

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan peneliti berupa wawancara, observasi dan dokumentasi terkait implementasi Kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Dinas Kabupaten Dharmasraya dan SDN yang menjadi implementor pada penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab V diatas dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, bisa diambil kesimpulan bahwasanya implementasi Kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Dinas Kabupaten Dharmasraya belum terlaksana secara optimal. Meskipun SPM Pendidikan sudah diberlakukan oleh pemerintah tahun 2018. Tetapi efektivitas dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar itu masih belum dipenuhi disebabkan masih dijumpainya Sekolah Dasar yang belum mencapai SPM Pendidikan dengan optimal dalam sarana prasarana yang kurang mendukung seperti di SDN 10 Sungai Rumbai. Hal ini berdampak tidak optimalnya penerapan kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan temuan peneliti diatas, yang sudah dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III bisa diambil kesimpulan beberapa hal. Pertama pada variabel komunikasi, informasi terkait kebijakan penerapan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya sudah disampaikan dengan baik pada pelaksana kebijakan seperti di SDN 08 Sungai Rumbai. Kedua variabel sumber daya, dari empat ketersediaan sumber daya yang diperlukan dua diantaranya sudah tersedia dengan baik yaitu informasi dan kewenangan. Tetapi indikator staff dan fasilitas menurut wawancara dan observasi peneliti ke SDN 10 Sungai Rumbai masih

terkendala dan kurang cukup memadai. Selanjutnya pengangkatan birokrat dalam variabel disposisi sudah selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan sebab juga tidak ada staff khusus dalam mengimplementasikan kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya. Di lain sisi intensif, tidak juga ada intensif yang diberikan secara khusus pada staff yang sudah mengimplementasikan kebijakan SPM pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya. Dan variabel terakhir yaitu struktur birokrasi, tidak ada SOP khusus dalam pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar, di lain sisi untuk fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab juga melibatkan pihak eksternal seperti biro tata pemerintahan dan SDN sebagai implementor dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Temuan penelitian ini juga hanya berfokus pada pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Dharmasraya, diharapkan untuk penelitian berikutnya bisa melihat semua capaian dari ketiga jenis pelayanan yang memuat pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan lebih kompleks dari penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian terkait implementasi Kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya yang sudah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan bisa memperbaiki ataupun menyempurnakan proses implementasi SPM Pendidikan Dasar. Saran itu sebagai berikut:

1. Menaikkan pemahaman implementor terkait indikator prioritas yang sudah ditetapkan untuk kabupaten/kota terkait SPM Pendidikan.

2. Dalam mengimplementasikan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, pemenuhan sumber daya manusia staff tenaga pengajar di tiap-tiap SD harus lebih diperhatikan.
3. Menaikkan kembali komunikasi di antara para implementor agar capaian SPM Pendidikan terlebih pendidikan dasar bisa mencapai target 100%.

